



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPORAN SINGKAT
RDPU KOMISI X DPR RI**
**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISET,
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan ke-	: 1 (satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Forum Perjuangan Honorer PGRI
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 Agustus 2024
Pukul	: 12.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M. /Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	: Penyampaian aspirasi tentang permasalahan di berbagai daerah terkait honorer
Hadir Komisi X DPR RI	: 27 dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Dr. Drs.H.Teguh Sumarno, M.M. (Ketua Umum PB PGRI Pusat) 2. Dr. H.Mansyur Arsyad, M.Pd. (Sekjen PB PGRI Pusat) 3. Ilham Wahyudi, S.Pd. (Humas PB PGRI Pusat)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 12.05 WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M. /Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan Narasumber dari **Forum Perjuangan Honorer PGRI** serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia yang telah

menyampaikan aspirasi dengan beberapa poin utama untuk melakukan penyelesaian permasalahan guru honorer, antara lain (bahan terlampir):

1. Mendorong penataan pegawai Non ASN di lingkungan pemerintah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Menyediakan formasi PPPK Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Negeri dan diberikan afirmasi berupa masa kerja dan usia.
3. Meminta seluruh guru honorer diangkat menjadi ASN tahun 2024 tanpa terkecuali.

B. Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Komisi X DPR RI mendorong pemerintah (Kemendikbudristek RI, Kemenpan-RB, Kemenkeu RI, Kemendagri RI) untuk melakukan penyelesaian permasalahan guru honorer tahun 2024.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan proses penerimaan dan pengangkatan Guru Honorer sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI menginisiasi rapat dengan K/L terkait bersama Komisi X DPR RI, untuk membahas penyelesaian permasalahan guru honorer.

C. Bahan masukan dari para narasumber menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan Komisi X DPR RI dan Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.45 WIB

KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM